

Implementasi Sinergitas TNI-POLRI Dalam Operasi Madago Raya Guna Mencegah Penyebaran Paham Terorisme dan Radikalisme di Wilayah Kabupaten Poso

Jemmy Yudanindra¹ Lukman Yudho Prakoso² Aom Dikdik Kustiwa³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: jemmy.yudanindra@gmail.com¹ lukman.prakoso@idu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergitas antara TNI dan Polri dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya guna menanggulangi ancaman terorisme dan mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Meskipun operasi ini telah berhasil menekan aktivitas kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), namun implementasi sinergitas di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal koordinasi, komunikasi, maupun keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan upaya penanggulangannya, serta merumuskan strategi penguatan sinergitas dalam rangka pencegahan penyebaran paham terorisme dan radikalisme di Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah, serta didukung oleh data sekunder dari dokumen operasi, laporan resmi, dan kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya telah berjalan baik, ditandai dengan peningkatan efektivitas komunikasi, koordinasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, masih terdapat faktor penghambat yang meliputi perbedaan struktur komando, keterbatasan sumber daya manusia dan logistik, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga sipil dalam program deradikalisasi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pembentukan posko terpadu, pelatihan bersama, kegiatan komunikasi sosial, dan kerja sama lintas sektor. Strategi penguatan sinergitas diarahkan pada keseimbangan antara tujuan (ends), cara (ways), dan sarana (means), dengan fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, regulasi, dan keterlibatan masyarakat sebagai mitra keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya merupakan bentuk kolaborasi strategis antara komponen pertahanan dan keamanan negara dalam menjaga stabilitas wilayah pasca-konflik serta mencegah berkembangnya kembali jaringan terorisme dan paham radikalisme di Kabupaten Poso. Keberhasilan sinergi ini menjadi model penting dalam pelaksanaan operasi terpadu berbasis pendekatan keamanan dan kemanusiaan di Indonesia.

Kata Kunci: Sinergitas, TNI-Polri, Operasi Madago Raya, Terorisme, Radikalisme, Kabupaten Poso

Abstract

This research is motivated by the importance of synergy between the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) in the implementation of Operation Madago Raya, which aims to counter terrorism threats and prevent the spread of radical ideologies in Poso Regency, Central Sulawesi Province. Although this operation has successfully suppressed the activities of the East Indonesia Mujahidin (MIT) group, the implementation of synergy in the field still faces various challenges, particularly in coordination, communication, and the involvement of local governments and communities. The purpose of this study is to analyze the implementation of TNI-Polri synergy in Operation Madago Raya, identify inhibiting factors and mitigation efforts, and formulate strategies to strengthen the synergy in preventing the spread of terrorism and radicalism ideologies in Poso Regency. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through in-depth interviews with key informants from TNI, Polri, and local government representatives, supported by secondary data from operational documents, official reports, and relevant academic studies. The findings reveal that the implementation of TNI-Polri synergy in Operation Madago Raya has generally been

effective, as indicated by the improvement in communication, coordination, and community engagement activities. However, several inhibiting factors remain, including differences in command structures, limited human and logistical resources, and insufficient support from local governments and civil institutions in deradicalization programs. Mitigation efforts have been carried out through the establishment of joint operation posts, joint training, social communication activities, and cross-sectoral cooperation. The strategy to strengthen synergy is directed toward achieving balance among ends, ways, and means, with a focus on institutional capacity building, regulatory support, and community involvement as security partners. The study concludes that the TNI–Polri synergy in Operation Madago Raya represents a strategic collaboration between the national defense and security components in maintaining post-conflict stability and preventing the re-emergence of terrorism networks and radical ideologies in Poso Regency. The success of this synergy serves as an important model for the implementation of integrated security and humanitarian-based operations in Indonesia.

Keywords: Synergy, TNI–Polri, Madago Raya Operation, Terrorism, Radicalism, Poso Regency



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keamanan nasional merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan keanekaragaman etnis, budaya, dan agama, ancaman terhadap stabilitas keamanan dalam negeri dapat muncul dari berbagai bentuk, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Salah satu bentuk ancaman internal yang paling kompleks adalah terorisme dan penyebaran paham radikalisme, yang telah berkembang dalam berbagai bentuk jaringan dan metode, termasuk melalui media sosial, komunitas tertutup, hingga lembaga pendidikan informal. Penyebaran paham radikal ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan wilayah, tetapi juga merusak fondasi ideologis kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika (Sutrisno & Fitriani, 2021). Wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso, telah lama menjadi perhatian nasional sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap aktivitas terorisme dan radikalisme. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang konflik komunal yang terjadi di daerah tersebut pada awal tahun 2000-an, yang kemudian menjadi titik awal tumbuhnya basis perlawanan bersenjata dari kelompok radikal. Salah satu kelompok paling dikenal yang beroperasi di daerah ini adalah Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang teridentifikasi memiliki afiliasi dengan jaringan terorisme global seperti Islamic State (ISIS). Keberadaan kelompok ini telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan, perampokan bersenjata, dan penyerangan terhadap aparat keamanan maupun warga sipil, yang berlangsung selama bertahun-tahun (Nurdin, 2023).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai operasi penegakan hukum di wilayah ini, di antaranya adalah Operasi Tinombala yang bertransformasi menjadi Operasi Madago Raya sejak tahun 2021. Operasi ini melibatkan unsur Polri dan TNI dalam satu kesatuan komando untuk menciptakan situasi kondusif dan menanggulangi jaringan radikalisme secara sistematis. Tujuan strategis dari operasi ini tidak hanya untuk memburu sisa-sisa kelompok MIT, tetapi juga menciptakan harmoni sosial melalui pendekatan deradikalisasi, kontra-propaganda, dan kegiatan pembinaan masyarakat. Namun, meskipun upaya ini sudah berlangsung bertahun-tahun, keberhasilan yang dicapai masih menghadapi tantangan besar, baik secara teknis, struktural, maupun kultural (Mabes Polri, 2025). Berdasarkan hasil evaluasi Renops Madago Raya 2025 Tahap I, diketahui bahwa masih terdapat kelompok masyarakat di wilayah operasi yang menganut paham radikal dan menunjukkan sikap eksklusif terhadap kelompok lain. Mereka diketahui menyebarkan ideologi khilafah, menolak sistem negara, dan

menciptakan intoleransi melalui ceramah, buletin, hingga media sosial. Beberapa di antaranya bahkan diketahui terlibat langsung dalam aksi kekerasan dan teror, serta memiliki afiliasi dengan jaringan internasional seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI). Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman terorisme tidak sepenuhnya hilang meskipun kelompok MIT telah berhasil dilemahkan secara signifikan (Renops Madago Raya, 2025).

Fenomena ini ditambah dengan penyebaran simpatisan kelompok radikal tidak hanya di Kabupaten Poso, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Sulawesi Tengah, seperti Parigi Moutong, Sigi, Tojo Una Una, Morowali, Morowali Utara, dan Kota Palu. Mereka memiliki jaringan komunikasi aktif yang mendukung aktivitas kelompok radikal secara terselubung. Beberapa dari mereka bahkan berperan sebagai perekrut atau penghubung antar wilayah. Pola penyebaran yang masif dan lintas kabupaten ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan kerja sama lintas sektor yang solid dan terkoordinasi (Renops Madago Raya, 2025). Selain itu, data pemetaan eks narapidana terorisme (napiter) di wilayah Sulawesi Tengah berdasarkan dokumen Renops Madago Raya Tahap 1 Tahun 2025 menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Hingga Maret 2025, terdapat 152 eks napiter yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di wilayah tersebut, dengan sebagian besar masih menunjukkan kecenderungan paham radikal. Kategori merah yang berarti masih menolak NKRI dan tidak bersosialisasi secara terbuka tercatat sebanyak 30 orang, sementara kategori kuning (masih berpaham radikal namun sudah bersosialisasi) sebanyak 111 orang, dan hanya 10 orang yang dikategorikan hijau atau sudah menerima NKRI sepenuhnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa potensi rekonsolidasi kelompok radikal sangat mungkin terjadi jika pendekatan deradikalisasi tidak dilakukan secara berkelanjutan dan humanis.

Salah satu pencapaian menonjol dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya Tahap I adalah ditemukannya aktivitas radikal di ruang siber, di mana akun media sosial “Pelajari Tauhid dan Ingkari Thaghut” membagikan pamflet paham radikal yang mengajak masyarakat menolak pemerintahan sah dan menyerukan doktrin khilafah.⁷ Selain itu, terdapat akun lain yang menyebarkan buletin SARA dan menandai 96 akun Facebook lainnya dalam sebuah kampanye digital ekstremis. Kondisi ini menunjukkan bahwa eks napiter dan simpatisan tidak hanya bergerak dalam ruang fisik, tetapi juga aktif dalam ruang digital sebagai media propaganda. Serangan terhadap pemikiran masyarakat melalui propaganda digital memiliki dampak jangka panjang karena tidak mudah dilacak, bersifat viral, dan dapat menjangkau seluruh wilayah. Oleh sebab itu, penanganan terhadap radikalisme memerlukan model operasi keamanan yang terintegrasi, berbasis intelijen siber, dan mampu mendekati akar ideologi yang berkembang di masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya 2025, ditemukan pula tantangan dalam pelibatan masyarakat dan tokoh agama dalam proses pencegahan radikalisme. Masih banyak tokoh masyarakat yang enggan terlibat aktif karena trauma masa lalu atau adanya simpati terhadap kelompok tertentu. Sebagian lainnya merasa pendekatan aparat terlalu koersif, sehingga membatasi ruang dialog yang konstruktif. Padahal, keberhasilan strategi deradikalisasi dan kontra-radikalisasi sangat tergantung pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, dan perempuan (Prasetyo, 2023).

Fenomena eksistensi eks narapidana terorisme yang sebagian besar masih memegang teguh paham radikal menunjukkan bahwa proses deradikalisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya berhasil menyentuh akar permasalahan. Dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya 2025 Tahap II, tercatat bahwa wilayah Kabupaten Poso menjadi daerah dengan jumlah eks napiter tertinggi, yakni sebanyak 101 orang, di mana 19 di antaranya masih berada dalam kategori merah menolak NKRI dan tidak berinteraksi dengan masyarakat luas. Kondisi ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena eks napiter tersebut dapat menjadi simpul baru penyebaran paham radikal yang lebih halus dan tidak terdeteksi secara kasatmata. Dari sisi

geografis, Kabupaten Poso juga memiliki kontur alam yang sangat strategis bagi kelompok radikal untuk menyusun ulang kekuatan. Wilayah pegunungan, hutan, dan jalur kebun yang tersebar luas dimanfaatkan sebagai tempat pelatihan, pelarian, atau titik konsolidasi kelompok-kelompok baru. Beberapa titik bahkan merupakan jalur klasik kelompok MIT yang telah dikenal aparat, namun masih sulit diawasi secara menyeluruh mengingat keterbatasan jumlah personel dan luasnya wilayah operasi. Hal ini menjadikan pendekatan keamanan fisik saja tidak cukup, tetapi harus disertai strategi intelijen dan komunikasi sosial yang mendalam.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa penyebaran ideologi radikal kini telah menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan perempuan. Dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya Tahap II, salah satu target operasi (JTO) yang dicatat adalah kalangan muda dan kelompok perempuan yang dianggap mudah terpapar melalui narasi keagamaan yang manipulatif dan menyentuh sisi emosional. Proses radikalisasi ini berjalan secara halus melalui media sosial, video pendek, serta forum belajar agama yang bersifat tertutup. Hal ini membuat identifikasi terhadap kelompok terpapar menjadi lebih sulit karena tidak ada gejala langsung dalam aktivitas keseharian mereka. Di sinilah peran preemtif dan kontra-narasi menjadi sangat penting, karena hanya dengan pendidikan ideologi yang tepat dan berkesinambungan, proses penanaman nilai-nilai toleransi dan kebangsaan dapat dilakukan. Berdasarkan berbagai temuan empiris tersebut, tampak jelas bahwa terdapat kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Idealnya, operasi keamanan terpadu seperti Madago Raya harus mampu tidak hanya menciptakan rasa aman, tetapi juga membangun ketahanan ideologis masyarakat. Namun, dalam realitasnya, operasi masih bersifat sektoral dan belum menyentuh akar persoalan secara utuh. Intervensi terhadap masyarakat masih didominasi oleh pendekatan keamanan daripada pendekatan edukatif dan kultural. Bahkan beberapa masyarakat lokal masih enggan terlibat dalam program deradikalisasi karena ketakutan terhadap stigmatisasi atau karena masih menyimpan simpati terhadap kelompok tertentu.¹⁸ Dalam situasi seperti ini, penting kiranya merumuskan strategi sinergitas yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berbasis lokalitas. Tesis ini bertujuan untuk membedah secara akademik pola implementasi sinergi TNI-Polri dalam konteks Operasi Madago Raya, dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang ada.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Operasi Madago Raya adalah kurangnya dukungan nyata dari pemerintah daerah. Program deradikalisasi, kontra-radikalisasi, hingga pembinaan eks napiter masih bertumpu pada Polri dan TNI tanpa sinergi optimal dari unsur pmda, Dinas Sosial, Kemenag, atau tokoh masyarakat. Padahal, dalam konsep "*whole-of-government approach*", stabilitas keamanan yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika seluruh sektor pemerintahan dan unsur masyarakat berjalan seiring. Ketidakterlibatan ini bukan hanya menghambat efektivitas operasi, tetapi juga menurunkan legitimasi program di mata masyarakat lokal. Tidak hanya itu, proses deradikalisasi yang dilakukan aparat juga membutuhkan waktu yang panjang dan metode yang adaptif. Pola pikir individu yang telah terdoktrin selama bertahun-tahun tidak dapat diubah hanya dengan intervensi singkat. Beberapa eks napiter menunjukkan respons positif di awal pembinaan, namun kemudian kembali berhubungan dengan kelompok lamanya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Situasi ini mempertegas bahwa program deradikalisasi harus memiliki kesinambungan, monitoring, dan pelibatan keluarga serta lingkungan sekitar sebagai aktor perubahan (Kurniawan & Priambodo, 2023).

Hal lain yang menjadi ancaman nyata adalah meningkatnya aktivitas penyebaran konten radikal di media sosial. Dari hasil patroli siber yang dilakukan Satgas Intelijen, ditemukan akun media sosial yang secara aktif membagikan konten bernuansa SARA dan ajaran takfiri. Media

sosial kini menjadi medan baru bagi kelompok radikal untuk mempropagandakan ideologi ekstrem, merekrut anggota, dan menyebarkan ketakutan melalui narasi simbolik. Hal ini tidak hanya menyasar generasi muda, tetapi juga kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang dianggap lebih mudah terpapar karena faktor emosional dan psikologis. Peran media sosial sebagai saluran penyebaran ideologi radikal kini menjadi tantangan yang sangat serius bagi Operasi Madago Raya. Dari hasil patroli siber yang dilakukan pada awal tahun 2025, ditemukan akun-akun seperti “Pelajari Tauhid dan Ingkari Thaghut” serta “Ditya Raditya” yang secara terbuka menyebarkan buletin bernuansa SARA dan mengandung ajakan untuk menolak sistem negara. Akun tersebut bahkan menandai puluhan akun lainnya sebagai bentuk jangkauan viral dalam upaya propaganda. Penyebaran pesan radikal di dunia maya bersifat masif, sulit dikontrol, dan memiliki daya pengaruh tinggi, terutama bagi anak muda yang masih dalam pencarian identitas. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pusat kendali informasi digital yang bersifat strategis dan terkoordinasi, agar penyebaran ideologi radikal bisa dibendung sejak dini. Jika tidak, maka ruang digital akan menjadi arena bebas bagi kelompok radikal untuk menyebarkan kebencian, memanipulasi agama, dan menanamkan paham teror.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat jelas adanya *empirical gap* antara harapan ideal sinergitas TNI-POLRI dalam Operasi Madago Raya dengan realitas implementasinya di lapangan. Selain itu, terdapat *research gap* dalam literatur keamanan nasional mengenai bagaimana membangun model sinergi operasional antara kedua institusi tersebut dalam konteks daerah pasca-konflik yang kompleks dan sensitif. Penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan model sinergi TNI-POLRI yang tidak hanya efektif dalam penindakan, tetapi juga solutif dalam pencegahan penyebaran ideologi radikal secara sistemik. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi para pengambil kebijakan dalam merancang strategi terpadu yang berorientasi pada keamanan berkelanjutan di wilayah pasca-konflik seperti Poso. Dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, penelitian ini akan menggali secara mendalam praktik sinergitas TNI-POLRI dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso. Fokus akan diarahkan pada dinamika koordinasi, tantangan di lapangan, partisipasi masyarakat, serta formulasi kebijakan pencegahan radikalisme yang berbasis kearifan lokal. Tujuannya bukan hanya menganalisis, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis. Dalam konteks ini, Kabupaten Poso menjadi representasi dari problematika keamanan multidimensi yang juga berpotensi terjadi di wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga aplikatif secara nasional dalam memperkuat kebijakan pengamanan daerah rawan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sinergitas TNI-POLRI dalam Operasi Madago Raya Guna Mencegah Penyebaran Paham Terorisme dan Radikalisme di Wilayah Kabupaten Poso.” Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perumusan kebijakan pengamanan terpadu dan memperkuat pemahaman terhadap pentingnya pendekatan sinergis dalam operasi pemeliharaan keamanan nasional jangka panjang. Fokus penelitian dalam studi ini adalah implementasi sinergitas TNI dan POLRI dalam Operasi Madago Raya guna mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme di wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Fokus ini dipilih berdasarkan urgensi strategis serta kompleksitas dinamika keamanan pasca-konflik di wilayah tersebut, yang hingga kini masih menjadi prioritas dalam agenda pertahanan nasional. Penetapan fokus ini bertujuan untuk memberikan arah yang terukur dalam eksplorasi data dan analisis mendalam terhadap praktik operasional keamanan terpadu, serta mencegah meluasnya ruang lingkup penelitian agar tetap kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali sejauh mana sinergitas antar

institusi TNI-POLRI telah berjalan secara efektif di lapangan, serta bagaimana dampaknya terhadap upaya pencegahan ideologi ekstrem.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi sinergitas TNI dan POLRI dalam Operasi Madago Raya guna mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme di wilayah Kabupaten Poso? Dari rumusan masalah tersebut, dapat dipecah ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana kondisi implementasi sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso saat ini? Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas TNI-Polri dalam operasi tersebut? Bagaimana strategi optimal untuk memperkuat implementasi sinergitas TNI-Polri dalam pencegahan penyebaran paham radikal secara berkelanjutan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi implementasi sinergitas antara TNI dan POLRI dalam Operasi Madago Raya guna mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme di wilayah Kabupaten Poso. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap efektivitas kolaborasi kedua institusi keamanan dalam konteks wilayah pasca-konflik. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini meliputi: Menganalisis implementasi sinergitas TNI-POLRI dalam Operasi Madago Raya. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sinergitas TNI-POLRI dalam pencegahan paham radikalisme. Menganalisis strategi yang optimal dan aplikatif dalam memperkuat sinergitas TNI-POLRI guna membendung penyebaran ideologi ekstrem di masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Andi Febri Herawati N, dkk. (2023). "Strategi Komunikasi Satgas Preventif Ops Madago Raya dalam Pemulihan Kamtibmas di Kabupaten Poso". Penelitian Andi dkk bertujuan untuk menggambarkan strategi komunikasi yang dijalankan oleh Satgas Preventif dalam Operasi Madago Raya guna memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Poso, yang rentan terhadap penyebaran paham radikalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas Preventif yang dipimpin oleh Komandan Satgas Brimob Polda Sulteng memfokuskan kegiatannya pada dua sektor: Sektor Parimo dan Sektor Pesisir Poso, dengan dukungan 12 personel di setiap pos sekat. Strategi komunikasi dilakukan melalui kunjungan langsung ke masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan moral dan nasionalisme secara persuasif. Intensitas komunikasi ditingkatkan melalui sambang rutin 2-3 kali seminggu guna membangun kembali rasa nasionalisme dan kesadaran kolektif masyarakat agar tidak terpapar paham radikal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengangkat konteks Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso serta menyoroti pentingnya pendekatan non-militer dalam mencegah radikalisme. Keduanya juga memperlihatkan keterlibatan aktif aparat keamanan di tingkat akar rumput, khususnya dalam menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mencegah penyebaran ideologi kekerasan.

Perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian. Penelitian oleh Andi Febri Herawati N, dkk. menitikberatkan pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh Satgas Preventif Brimob Polda Sulteng. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih luas dalam lingkupnya karena mengkaji sinergitas antara TNI dan Polri dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya, khususnya dalam upaya mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Penelitian penulis juga berorientasi pada integrasi antar institusi dan koordinasi strategis lintas sektor keamanan. Dengan mengkaji sinergitas TNI-Polri, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang ada dengan menawarkan perspektif

kelembagaan serta merumuskan model kolaborasi antar aparat keamanan dalam konteks operasi penanggulangan terorisme di daerah konflik. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam pembentukan strategi terpadu yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Poso, serta memperkuat implementasi kebijakan deradikalisasi yang berbasis sinergi dan pendekatan humanis.

Roma Tressa. (2023). "Kebijakan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso". Penelitian yang dilakukan oleh Roma Tressa (2023) bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan penanganan terorisme di Kabupaten Poso dalam kurun waktu 2012 hingga 2021. Kajian ini menekankan bahwa penanganan terorisme di Kabupaten Poso didominasi oleh pendekatan hard approach melalui berbagai operasi keamanan oleh TNI dan Polri, seperti Operasi Kendali Maleo, Operasi Aman Maleo, Operasi Camar Maleo, Operasi Tinombala, dan Operasi Madago Raya. Di sisi lain, soft approach juga dilakukan melalui upaya deradikalisasi, pemberdayaan sosial keagamaan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, meskipun belum melibatkan secara optimal peran serta masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Penelitian Roma Tressa memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam hal objek kajian yang sama, yaitu wilayah Kabupaten Poso dan topik mengenai penanggulangan terorisme. Kedua penelitian sama-sama membahas kebijakan yang telah diterapkan dan bagaimana dampaknya dalam menghadapi ancaman radikalisme serta terorisme, khususnya yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Namun terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. Penelitian Roma Tressa lebih menekankan pada kebijakan formal dan pendekatan operasional dari perspektif pemerintah, terutama dari sisi yuridis dan implementasi UU Nomor 5 Tahun 2018 serta sejumlah kebijakan lintas sektor yang berlaku di Kabupaten Poso. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada implementasi sinergitas antara TNI dan Polri dalam Operasi Madago Raya, bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan keamanan tetapi sebagai aktor utama yang berkolaborasi dalam mencegah penyebaran paham radikalisme melalui sinergi koordinatif dan strategis lintas institusi keamanan. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam konteks kebijakan penanganan terorisme, khususnya dalam menjelaskan bagaimana implementasi sinergitas antar lembaga, terutama TNI dan Polri, memiliki dampak nyata dalam mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme secara sistematis. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini juga akan menggambarkan model sinergi yang lebih terukur dan partisipatif dibanding penelitian terdahulu, serta menyoroti pentingnya peran lokal dan pendekatan strategis keamanan non-represif dalam menghadapi tantangan ekstremisme berbasis kekerasan di Poso.

Pujo Widodo, dkk (2023). "*Indonesian National Military Operation Cooperation (TNI) And The Police of the Republic Of Indonesia (POLRI) In Tackling the Threat of Terrorism in Poso*". Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja sama TNI dan Polri dalam menangani ancaman terorisme di Kabupaten Poso dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan dilakukan melalui dua pendekatan utama: hard approach dan soft approach. Pendekatan keras diterapkan melalui berbagai operasi formal seperti Operasi Maleo, Tinombala, hingga Madago Raya. Sedangkan pendekatan lunak dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, bantuan modal usaha kepada mantan teroris, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan informal. Penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antar-lembaga keamanan serta perlunya peran aktif masyarakat dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan penanggulangan terorisme. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal lokasi dan isu strategis yang diangkat, yakni penanggulangan terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Keduanya sama-sama menekankan pada pentingnya kerja sama lintas institusi sebagai strategi utama dalam

merespons ancaman radikalisme dan terorisme. Selain itu, keduanya menggunakan kerangka hukum nasional sebagai landasan operasional, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Penelitian Pujo Widodo dkk. menitikberatkan pada evaluasi umum kerja sama TNI-Polri dalam berbagai operasi penanggulangan terorisme secara nasional yang terimplementasi di Poso. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada implementasi sinergitas TNI-Polri secara khusus dalam Operasi Madago Raya dengan pendekatan studi kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga akan lebih mendalami aspek strategis dari sinergitas tersebut dalam mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai landasan empiris dan teoritis mengenai pentingnya kerja sama TNI-Polri dalam penanganan terorisme. Penelitian penulis akan melengkapi dengan penajaman pada tataran implementasi strategi sinergitas di tingkat satuan tugas, serta menggali aspek peran sosial, ideologis, dan struktural dalam mendukung keberhasilan Operasi Madago Raya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi peningkatan efektivitas operasi penanggulangan terorisme di Poso.

Rezky Merdiansyah, dkk. (2024). "Penerapan *Community Crime Prevention* pada Operasi Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT di Poso". Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan *Community Crime Prevention* (CCP) oleh Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT telah dilakukan secara sistematis dan efektif dalam upaya menggalang partisipasi masyarakat Poso terhadap operasi pemberantasan terorisme. Melalui serangkaian tahapan seperti pendefinisian masalah, analisis lapangan, penyusunan rencana aksi, hingga evaluasi program, Satgas berhasil membangun struktur koordinasi dengan masyarakat. Namun, penelitian juga menyoroti bahwa kendala ekonomi dan ancaman nyata dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) masih menjadi hambatan signifikan bagi keterlibatan masyarakat secara optimal. Meski rumit dan membutuhkan sumber daya besar, pelibatan masyarakat melalui CCP dipandang sebagai strategi yang esensial dan berdampak dalam menjaga keamanan komunitas. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam hal fokus terhadap wilayah operasi Madago Raya di Kabupaten Poso dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam strategi penanggulangan terorisme. Keduanya menyoroti bahwa dukungan warga lokal adalah faktor krusial dalam keberhasilan operasi pemberantasan teror. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga sama-sama mengedepankan metode kualitatif deskriptif dalam menjelaskan kompleksitas permasalahan keamanan di wilayah tersebut.

Perbedaan utama terletak pada cakupan dan fokus analisis. Penelitian oleh Rezky Merdiansyah, dkk. lebih berorientasi pada evaluasi penerapan konsep CCP dari sudut pandang intelijen dan penggalangan terhadap masyarakat, sedangkan penelitian ini akan mengkaji lebih luas tentang sinergitas antara TNI dan Polri dalam operasi Madago Raya. Fokus penulis akan mencakup aspek koordinasi strategis, pembagian peran kelembagaan, hingga upaya bersama dalam mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme melalui pendekatan kolaboratif antar lembaga. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat melengkapi kajian terdahulu dengan menyoroti aspek sinergitas antarsektor keamanan (TNI-POLRI) yang belum dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis dalam merumuskan model operasional terpadu dan efektif dalam menangkal paham radikal di wilayah rawan konflik seperti Kabupaten Poso.

Andi Febri Herawati dan Ilyas. (2024). *Communication Strategy of the National Police Organization in the Implementation of the "Madago Raya Police" Program in Handling Radicalism In Poso Regency*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Polres Poso melalui program "Madago Raya" terbukti efektif dalam menangani radikalisme di Kabupaten Poso. Strategi komunikasi dilakukan dengan pendekatan door to door, perancangan pesan (message design), pendekatan sosial, serta penggunaan media massa dan bantuan sosial sebagai instrumen komunikasi persuasif. Pesan-pesan yang disampaikan bersifat ajakan untuk turut menjaga kamtibmas dan diarahkan untuk mengubah pola pikir mantan narapidana terorisme agar lebih moderat, pluralis, dan inklusif. Program ini juga memberikan dukungan ekonomi berupa bantuan modal usaha, renovasi rumah, kendaraan roda dua, dan fasilitas pembuatan SIM gratis, yang berdampak pada meningkatnya partisipasi mantan narapidana terorisme dalam kegiatan positif. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama berfokus pada implementasi program "Madago Raya" di Kabupaten Poso serta bertujuan mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme. Persamaannya terletak pada fokus wilayah, yaitu Kabupaten Poso, dan pendekatan non-kekerasan (*soft approach*) yang menjadi strategi utama dalam upaya deradikalisasi.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada sudut pandang serta aktor utama yang dianalisis. Penelitian Andi Febri Herawati dan Ilyas berfokus pada strategi komunikasi institusional yang dilakukan oleh Polri (khususnya Polres Poso) dalam menyukseskan program Madago Raya. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menekankan pada aspek sinergitas antara TNI dan Polri dalam implementasi Operasi Madago Raya, mencakup koordinasi, pembagian tugas, dan kolaborasi dalam pencegahan penyebaran paham terorisme dan radikalisme secara lebih luas. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan memberikan kontribusi baru berupa analisis terhadap peran gabungan (sinergitas) TNI dan Polri dalam operasi terpadu, serta mengkaji bagaimana kerja sama tersebut dapat memperkuat efektivitas program deradikalisasi yang sudah ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif strategis dalam penanggulangan terorisme dengan memperhatikan faktor sinergi antar institusi keamanan negara di daerah rawan konflik seperti Poso.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan komprehensif bagaimana sinergitas antara TNI dan POLRI diimplementasikan dalam Operasi Madago Raya dalam rangka mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme di Kabupaten Poso. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, perspektif, dan dinamika sosial yang terjadi secara langsung di lapangan, khususnya menyangkut kolaborasi antar lembaga keamanan negara. Penelitian ini tidak berorientasi pada kuantifikasi data, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai proses, tantangan, dan keberhasilan implementasi sinergi lintas institusi keamanan. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana sinergitas TNI-POLRI dibangun, dijalankan, serta dievaluasi dalam konteks operasi kontra-radikalisme di daerah yang memiliki sejarah panjang konflik seperti Poso. Pendekatan deskriptif kualitatif kasus dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada Operasi Madago Raya sebagai fenomena strategis yang kompleks dan bersifat kontekstual. Studi ini akan melibatkan narasumber kunci seperti personel TNI, Polri, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan lokal, serta mantan napi

terorisme atau keluarganya sebagai bagian dari triangulasi data. Studi kasus juga memungkinkan eksplorasi terhadap unsur kebijakan, koordinasi operasional, serta persepsi masyarakat lokal terhadap efektivitas operasi.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada penyajian narasi dan analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti, tanpa manipulasi variabel. Tujuannya adalah untuk memahami dan memaparkan proses implementasi sinergitas TNI dan POLRI dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso. Desain ini fleksibel dan terbuka terhadap dinamika yang muncul selama proses penelitian berlangsung. Mengingat karakteristik wilayah Poso sebagai daerah yang kompleks secara historis, kultural, dan sosial-politik, desain kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap dinamika tersebut dari sudut pandang pelaku lapangan dan masyarakat yang terdampak secara langsung. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan tidak hanya menjadi bahan kajian ilmiah, tetapi juga memberi kontribusi konkret dalam pengembangan kebijakan keamanan nasional berbasis kolaborasi antarlembaga dan pendekatan deradikalisasi yang kontekstual di daerah rawan konflik seperti Poso.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Poso. Data dan bahan referensi diambil dari beberapa sumber data yang valid dan terukur untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Adapun lokasi dari penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian, tidak mesti mengacu kepada wilayah namun juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2019). Penelitian ini diawali pada bulan Mei s.d Oktober 2025. Dalam penelitian kualitatif, subyek dan obyek penelitian merupakan dua elemen kunci yang menjadi pijakan dalam perumusan fokus studi, pengumpulan data, dan analisis mendalam. Subyek mencerminkan siapa yang menjadi sumber utama informasi, sedangkan obyek adalah fenomena atau gejala sosial yang hendak dikaji secara komprehensif. Keduanya saling terkait dan menentukan arah serta keluasan pembahasan dalam penelitian lapangan (Sugiyono, 2013:225). Subyek penelitian dalam studi ini adalah para individu yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan mendalam terkait pelaksanaan Operasi Madago Raya, khususnya pada aspek sinergitas antara TNI dan Polri dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Mereka merupakan aktor utama yang memahami praktik di lapangan serta kebijakan strategis yang diterapkan dalam operasi tersebut. Pemilihan informan menggunakan pendekatan purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa subyek tersebut memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas untuk memberikan informasi relevan (Sugiyono, 2015:188–189). Selain itu, apabila dalam proses wawancara ditemukan tokoh kunci yang belum teridentifikasi sebelumnya namun memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan operasi, maka peneliti akan menggunakan metode snowball sampling sebagai teknik tambahan (Idrus, 2009:92). Menurut Raco (2010:109), terdapat lima kriteria dalam memilih informan utama, yaitu: (1) memiliki akses terhadap informasi primer, (2) mampu mengartikulasikan pengalaman dengan jelas, (3) terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi, (4) bersedia diwawancarai secara terbuka, dan (5) tidak dalam kondisi tertekan atau terpengaruh oleh pihak eksternal. Dalam konteks ini, subyek penelitian terdiri dari personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Madago Raya. Pemilihan subyek mempertimbangkan keberagaman institusi dan pandangan agar diperoleh perspektif yang menyeluruh mengenai implementasi sinergitas dalam operasi.

Obyek penelitian adalah pokok permasalahan atau gejala sosial yang menjadi fokus analisis ilmiah. Menurut Sugiyono (2014:20), obyek merupakan segala sesuatu yang menjadi sasaran pengamatan dalam rangka memperoleh pengetahuan ilmiah. Dalam penelitian ini, obyek utama adalah implementasi sinergitas antara TNI dan Polri dalam Operasi Madago Raya

sebagai bagian dari upaya sistematis negara untuk mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme di Kabupaten Poso. Penelitian ini tidak hanya melihat pada tataran formal kebijakan, tetapi menelaah bagaimana sinergitas tersebut diterapkan secara konkret di lapangan, termasuk dalam perencanaan operasi, koordinasi lintas lembaga, distribusi peran antara TNI dan Polri, serta interaksinya dengan masyarakat sipil. Fokus utama diarahkan pada bagaimana kombinasi hard power (operasi militer-polisi) dan soft power (pendekatan kemasyarakatan) dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Pengumpulan data merupakan tahapan vital dalam penelitian kualitatif, karena kualitas dan kedalaman data yang dihimpun akan sangat menentukan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa pemilihan teknik yang tepat dalam pengumpulan data merupakan syarat utama untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan dan kaidah ilmiah. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan bersifat lapangan, yaitu peneliti memperoleh data langsung dari sumber primer yang mengalami dan terlibat dalam fenomena sinergitas TNI-POLRI di lapangan, khususnya dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi pustaka untuk memperoleh pemahaman komprehensif dari berbagai dimensi. Teknik ini juga diarahkan untuk mendukung triangulasi data, guna meningkatkan keabsahan temuan, dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, metode, dan perspektif. Adapun teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan ialah sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi secara mendalam dari narasumber. Jenis wawancara yang diterapkan adalah semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan pedoman pertanyaan terbuka yang fleksibel. Model ini memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai dinamika percakapan, serta menggali informasi yang tidak terduga namun relevan secara kontekstual. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali secara langsung : Proses koordinasi dan integrasi antar lembaga TNI dan Polri dalam Operasi Madago Raya, Strategi pencegahan penyebaran radikalisme dan terorisme, Hambatan struktural dan kultural dalam membangun sinergitas Operasional dan selain sebagai teknik utama, wawancara juga menjadi alat validasi silang (cross-checking) terhadap data observasi dan dokumen yang dikaji.
2. Observasi. Observasi dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi data hasil wawancara dengan mengamati langsung berbagai aktivitas yang berkaitan dengan implementasi Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso. Teknik ini melibatkan observasi langsung terhadap kegiatan patroli keamanan, program deradikalisasi, interaksi antara aparat dan masyarakat, serta pelibatan tokoh lokal. Selain itu, observasi juga dilakukan melalui dokumentasi video, foto, atau arsip media yang relevan. Observasi diarahkan untuk mengamati praktik nyata sinergitas TNI-Polri di lapangan, baik dalam bentuk kolaborasi struktural, kegiatan kemasyarakatan, maupun pelaksanaan program kontra-radikalisasi. Teknik ini sangat penting dalam menangkap nuansa sosial, pola relasi antar lembaga, serta konteks budaya masyarakat lokal yang menjadi medan operasi. Melalui observasi, peneliti dapat memahami bagaimana strategi sinergi keamanan diterapkan, sejauh mana masyarakat merespons, serta hambatan-hambatan taktis yang dihadapi oleh aparat di lapangan.
3. Studi Pustaka. Studi pustaka atau kajian literatur menjadi metode pendukung yang tidak kalah penting dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen resmi, artikel jurnal, buku akademik, laporan pemerintah, dan sumber-sumber kredibel lainnya yang berkaitan dengan terorisme, radikalisme, strategi keamanan nasional,

dan khususnya Operasi Madago Raya. Dalam konteks penelitian ini, studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teoritis seperti konsep sinergitas antar lembaga, teori radikalisme, strategi kontra-terorisme, dan pendekatan Smart Power. Selain itu, kajian pustaka juga berfungsi untuk membandingkan hasil lapangan dengan hasil penelitian terdahulu, serta menjadi bagian dari proses triangulasi data. Melalui kajian ini, peneliti dapat memastikan bahwa analisis yang dilakukan tetap berada dalam kerangka ilmiah yang valid dan terhubung dengan wacana akademik yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menghimpun, mengorganisasikan, dan menyusun berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya guna mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme di wilayah Kabupaten Poso. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual dan mendalam tentang pelaksanaan operasi terpadu Madago Raya, termasuk dinamika kerja sama antar instansi, pola koordinasi di lapangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sinergitas kedua institusi dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi ke dalam kategori yang relevan, menguraikan data ke dalam unit tematik, melakukan sintesis terhadap hasil wawancara dan dokumen operasi, serta menyusun pola hubungan antar faktor yang berkontribusi terhadap pelaksanaan sinergitas. Selanjutnya, data yang dianggap signifikan dianalisis untuk menarik kesimpulan sementara yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara bertahap dan sistematis.

Subjek penelitian ini adalah para narasumber dari unsur TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya di wilayah Kabupaten Poso. Dalam pendekatan kualitatif, mereka disebut informan kunci, yaitu individu yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan operasi terpadu, baik dari aspek intelijen, preemtif, preventif, maupun dukungan logistik dan teritorial. Berdasarkan unit analisis yang telah ditetapkan sebelumnya, penelitian ini melibatkan tujuh informan utama, yaitu:

1. Kasatgas I Intelijen, yang memiliki peran strategis dalam pengumpulan informasi, analisis ancaman, dan deteksi dini terhadap pergerakan jaringan radikal dan terorisme.
2. Kasatgas II Preemtif, yang fokus pada pembinaan masyarakat, edukasi ideologi kebangsaan, serta pencegahan penyebaran paham ekstrem.
3. Kasatgas III Preventif, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan patroli gabungan dan pengamanan wilayah untuk mencegah munculnya kembali aktivitas teror di Poso.
4. Kasatgas IV Bantuan, yang berperan dalam dukungan logistik, kesehatan lapangan, dan koordinasi teknis antara unsur TNI-Polri di daerah operasi.
5. Dandim 1307/Poso, sebagai unsur komando teritorial yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperkuat sinergitas di tingkat kewilayahan.
6. Danramil, sebagai unsur pelaksana pembinaan teritorial di tingkat kecamatan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah rawan.
7. Babinsa, yang menjadi ujung tombak TNI dalam kegiatan penggalangan, komunikasi sosial, dan pembinaan ideologi masyarakat di desa-desa binaan.

Para informan tersebut dipilih secara purposif berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya dan peran strategis yang dimiliki dalam menjelaskan fenomena sinergitas TNI-Polri di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa

metode yang saling melengkapi dan dilaksanakan dalam berbagai konteks, sumber, serta cara, guna memperoleh data yang lengkap dan valid. Dalam penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi metode utama karena memungkinkan peneliti menggali informasi langsung dari para pelaku lapangan dan memperoleh pemahaman kontekstual terhadap fenomena sinergitas operasi. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka (*face-to-face interview*) dengan pendekatan semi-terstruktur, menggunakan panduan wawancara yang disusun berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian: (1) kondisi implementasi sinergitas TNI–Polri dalam Operasi Madago Raya, (2) faktor-faktor penghambat pelaksanaan sinergitas, dan (3) strategi penguatan sinergitas dalam pencegahan paham radikal secara berkelanjutan. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi tentang bentuk kerja sama operasional antar instansi, mekanisme koordinasi di lapangan, serta tantangan sosial dan ideologis yang dihadapi selama pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Poso.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi lapangan dan studi dokumentasi untuk memperkuat keabsahan data. Ketiga metode tersebut saling berhubungan dan digunakan secara terpadu agar hasil penelitian menggambarkan kondisi empiris sinergitas TNI–Polri secara utuh. Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu Data primer, yang berasal dari wawancara langsung dengan para informan dan hasil observasi di lapangan. Data sekunder, yang diperoleh melalui penelaahan dokumen resmi seperti Rencana Operasi (RENOPS) Madago Raya 2024–2025 Tahap I–III, Kirka Intelijen Sulteng 2024, laporan kegiatan Satgas, publikasi akademik, serta arsip laporan kegiatan deradikalisasi dan pembinaan masyarakat. Selanjutnya, seluruh data yang terkumpul diseleksi dan dikategorikan melalui proses reduksi data, yaitu memilah dan memisahkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian untuk dianalisis lebih lanjut. Proses reduksi ini dilakukan dengan menata ulang hasil wawancara, observasi, dan dokumen sesuai tiga fokus utama penelitian: implementasi, faktor penghambat, dan strategi penguatan sinergitas.

Pembahasan

Implementasi Sinergitas TNI–Polri dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso

Pelaksanaan sinergitas TNI–Polri dalam Operasi Madago Raya merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan strategis negara di bidang keamanan dalam negeri, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan mencegah penyebaran paham terorisme serta radikalisme di wilayah Sulawesi Tengah. Dalam kerangka kebijakan publik, implementasi sinergitas ini mencerminkan penerapan model kolaboratif antara dua institusi negara yang berbeda karakter organisasi, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keutuhan NKRI dan melindungi masyarakat dari ancaman ideologi kekerasan. Secara umum, pelaksanaan operasi telah menunjukkan arah yang positif. Sinergitas antara TNI dan Polri berlangsung dalam mekanisme komando terpadu dengan pembagian tugas yang jelas. TNI berperan dalam dukungan teritorial, intelijen, dan operasi militer selain perang (OMSP), sedangkan Polri menjalankan fungsi utama penegakan hukum dan tindakan preventif.

Komunikasi

Dalam perspektif teori Edwards III, komunikasi merupakan faktor paling mendasar dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat diterjemahkan dan dijalankan dengan benar oleh pelaksana di lapangan. Dalam pelaksanaan Operasi Madago Raya, efektivitas komunikasi menjadi fondasi utama keberhasilan sinergi TNI–Polri. Mekanisme penyampaian instruksi, koordinasi kegiatan, dan pelaporan situasi telah berjalan secara sistematis dalam struktur komando terpadu. Kejelasan dan konsistensi pesan kebijakan memungkinkan setiap pelaksana

memahami arah tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga menghindari tumpang tindih kewenangan. Namun, tantangan komunikasi tetap muncul akibat faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah operasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya bergantung pada kualitas koordinasi antar instansi, tetapi juga pada dukungan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan sistem komunikasi lapangan dan integrasi teknologi informasi menjadi elemen penting untuk memperkuat efektivitas sinergitas ke depan.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, logistik, anggaran, sarana-prasarana, dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Dalam konteks Operasi Madago Raya, ketersediaan sumber daya manusia dari unsur TNI dan Polri dapat dikatakan memadai dari segi kuantitas dan kualitas, mengingat keterlibatan personel profesional dari berbagai satuan. Namun demikian, tantangan masih muncul pada aspek logistik dan dukungan anggaran yang belum sepenuhnya proporsional dengan luasnya wilayah operasi dan tingkat kerawanan yang dihadapi. Sumber daya kewenangan telah diatur secara jelas dalam struktur komando operasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran. TNI bertugas dalam aspek teritorial dan pembinaan masyarakat, sedangkan Polri memegang fungsi utama penegakan hukum. Keseimbangan kewenangan ini menunjukkan bentuk implementasi kebijakan yang terkoordinasi dengan baik. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa variabel sumber daya dalam implementasi Operasi Madago Raya telah terpenuhi secara cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan dukungan logistik dan anggaran untuk menjaga efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana menggambarkan komitmen, loyalitas, dan motivasi aparat dalam menjalankan kebijakan. Menurut Edwards III, pelaksana yang memiliki disposisi positif terhadap kebijakan akan melaksanakan tugas dengan dedikasi dan integritas tinggi. Dalam konteks Operasi Madago Raya, disposisi menjadi faktor penguat utama keberhasilan sinergitas TNI-Polri. Komitmen yang kuat, rasa tanggung jawab terhadap misi negara, serta semangat pengabdian dalam menjaga keamanan wilayah Poso telah membentuk karakter implementasi kebijakan yang stabil dan konsisten. Sikap profesional dan loyalitas tinggi antar anggota TNI dan Polri juga mencerminkan keberhasilan pembinaan personel dan penanaman nilai-nilai pengabdian kepada bangsa. Dengan demikian, dari aspek disposisi, sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya dapat dinilai sangat baik karena menunjukkan keharmonisan kerja dan kesamaan misi antara dua institusi yang berbeda kultur organisasi.

Struktur Birokrasi

Variabel terakhir dalam teori Edwards III adalah struktur birokrasi. Struktur yang terlalu panjang atau tidak sinkron dapat menghambat proses implementasi kebijakan karena memperlambat koordinasi dan pengambilan keputusan. Struktur birokrasi dalam Operasi Madago Raya telah dirancang dalam bentuk komando terpadu dengan pembagian tugas operasional yang jelas ke dalam empat satuan tugas (Satgas). Masing-masing Satgas memiliki bidang tanggung jawab yang berbeda namun saling mendukung untuk mencapai sasaran operasi. Pembagian tugas ini menunjukkan bentuk organisasi yang fungsional dan efisien. Kendati demikian, belum adanya regulasi formal berupa Standard Operating Procedure (SOP) terpadu lintas institusi menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan jangka

panjang. Saat ini, koordinasi masih bergantung pada mekanisme komando operasi dan hubungan personal antar pejabat lapangan. Untuk memperkuat implementasi sinergitas secara berkelanjutan, diperlukan penyusunan regulasi dan SOP bersama yang menjadi dasar hukum dan pedoman tetap dalam pelaksanaan operasi lintas lembaga.

Berdasarkan keempat variabel dalam teori implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso telah berjalan efektif, namun belum mencapai tingkat optimal. Aspek komunikasi dan disposisi menjadi faktor dominan yang mendukung keberhasilan sinergi karena adanya kejelasan perintah, kesamaan visi, dan komitmen tinggi dari seluruh personel. Sementara itu, aspek sumber daya dan struktur birokrasi masih memerlukan penguatan terutama pada dukungan logistik, sistem komunikasi lapangan, serta regulasi formal lintas institusi. Secara keseluruhan, pelaksanaan Operasi Madago Raya telah menggambarkan implementasi kebijakan yang berhasil dalam membangun sinergitas antarlembaga pertahanan dan keamanan. Namun untuk mencapai efektivitas yang berkelanjutan, perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya dan pembentukan tata kelola sinergi yang bersifat permanen. Dengan demikian, sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya bukan hanya menjadi instrumen penegakan keamanan, tetapi juga contoh nyata implementasi kebijakan pertahanan-keamanan nasional yang berbasis kolaborasi, profesionalitas, dan komitmen terhadap stabilitas bangsa.

Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Sinergitas TNI-Polri dalam operasi Madago Raya

Pembahasan ini menguraikan berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan sinergitas antara TNI dan Polri dalam Operasi Madago Raya, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya. Analisis ini menggunakan kerangka teori Sinergi Najianti (2014) yang menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi antarlembaga sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi dan koordinasi. Apabila salah satu aspek ini terganggu, maka proses sinergi akan menurun dan berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan. Operasi Madago Raya merupakan bentuk kerja sama strategis antara TNI dan Polri yang bertujuan menjaga keamanan, menekan aktivitas kelompok radikal, serta memulihkan stabilitas sosial di wilayah Poso dan sekitarnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sinergitas di lapangan tidak terlepas dari sejumlah kendala, baik yang bersifat struktural, operasional, sosial, maupun koordinatif lintas sektor.

Kendala Struktural dan Birokratis

Kendala struktural merupakan hambatan yang muncul akibat perbedaan sistem komando, prosedur birokrasi, serta pola kerja antar lembaga. Dalam konteks sinergitas TNI-Polri, perbedaan karakteristik organisasi sering kali menimbulkan perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, belum adanya SOP gabungan yang bersifat permanen antara TNI dan Polri dalam konteks operasi pasca-konflik menjadi faktor penghambat utama. Ketidakhadiran regulasi yang baku menyebabkan masing-masing instansi masih menggunakan pedoman internal yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Dalam teori sinergi, hal ini menggambarkan lemahnya “koordinasi terstruktur” yang seharusnya menjadi prasyarat utama terbentuknya kerja sama yang efektif. Rotasi personel yang cepat, terutama pada unsur TNI, juga menjadi hambatan tambahan. Perubahan personel di tengah operasi mengakibatkan perlunya waktu adaptasi untuk memahami sistem kerja lintas institusi yang telah terbangun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor struktural bersifat fundamental dan membutuhkan penataan kelembagaan agar sinergi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Kendala Operasional dan Sumber Daya

Aspek operasional berkaitan dengan kemampuan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Teori sinergi menempatkan komunikasi sebagai faktor utama dalam menghubungkan sumber daya antar organisasi agar dapat digunakan secara efektif. Dalam konteks Operasi Madago Raya, keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan sarana komunikasi menjadi penghambat utama dalam mewujudkan sinergi operasional. Jumlah personel di lapangan, terutama pada tahap pemeliharaan operasi, mengalami pengurangan dibandingkan masa penindakan terhadap MIT. Penurunan ini berdampak pada berkurangnya jangkauan patroli, pembinaan masyarakat, dan kegiatan deradikalisasi berbasis komunitas. Selain itu, kondisi geografis Poso yang terdiri dari daerah pegunungan dan hutan dengan akses transportasi terbatas memperberat beban operasional, karena distribusi logistik dan rotasi pasukan membutuhkan waktu serta biaya besar. Hambatan komunikasi teknis antar instansi juga menjadi kendala tersendiri. Perbedaan sistem dan frekuensi alat komunikasi antara TNI dan Polri sering kali memperlambat penyampaian informasi situasional, terutama dalam kondisi darurat. Berdasarkan teori sinergi, gangguan pada sistem komunikasi semacam ini dapat menurunkan efektivitas koordinasi, karena informasi yang terlambat mengakibatkan reaksi yang tidak sinkron di lapangan. Dari sisi anggaran, Operasi Madago Raya juga masih menghadapi keterbatasan dukungan keuangan, terutama untuk kegiatan sosial dan deradikalisasi yang bersifat nonmiliter. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan operasional dan kemampuan aktual, sehingga beberapa program pembinaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kendala Sosial dan Ideologis Masyarakat

Kendala sosial dan ideologis menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sinergitas yang efektif. Meskipun situasi keamanan di Poso telah membaik, masih terdapat kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi emosional dengan jaringan lama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) maupun kelompok simpatisan radikal yang tersebar di sejumlah wilayah sekitar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa permasalahan ideologi tidak dapat diatasi hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi memerlukan strategi komunikasi sosial yang persuasif dan humanis. Dalam perspektif teori sinergi, hambatan ini menggambarkan kesenjangan komunikasi antara aparat dan masyarakat. Sinergi tidak akan optimal jika hubungan antara lembaga pelaksana dan pihak sasaran kebijakan (masyarakat) belum didasari oleh rasa saling percaya. Sisa trauma akibat konflik masa lalu dan masih adanya stigma negatif terhadap aparat keamanan memperlambat proses pemulihan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan sinergitas TNI–Polri dalam konteks sosial sangat bergantung pada kemampuan membangun komunikasi yang adaptif dan empatik dengan masyarakat. Pendekatan sosial yang humanis, keterlibatan tokoh agama, dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan menjadi langkah penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.

Kendala Koordinasi Lintas Sektor

Kendala koordinasi lintas sektor berkaitan dengan belum optimalnya peran pemerintah daerah dan lembaga sipil dalam mendukung pelaksanaan Operasi Madago Raya. Meskipun TNI dan Polri telah berperan dominan dalam menjaga keamanan, keberhasilan pencegahan radikalisme seharusnya melibatkan instansi lain seperti dinas sosial, pendidikan, dan lembaga keagamaan. Minimnya dukungan dari sektor sipil membuat program deradikalisasi dan pembinaan ekonomi alternatif tidak berjalan secara berkelanjutan. Dari sudut pandang teori sinergi, lemahnya koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa integrasi antar sistem belum berjalan sempurna. Sinergi sejati menuntut adanya hubungan saling ketergantungan dan

partisipasi aktif dari seluruh komponen, bukan hanya dari aparat keamanan. Ketika koordinasi lintas sektor lemah, hasil operasi menjadi tidak berkelanjutan karena tidak disertai perubahan sosial-ekonomi yang mendukung stabilitas jangka panjang.

Menghadapi berbagai kendala tersebut, TNI dan Polri telah melaksanakan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sinergitas dan memperkecil potensi hambatan. Langkah-langkah tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua pendekatan utama sesuai teori sinergi, yakni peningkatan komunikasi efektif dan penguatan koordinasi terstruktur. Pada aspek komunikasi, dibentuk posko gabungan operasi sebagai pusat kendali bersama, yang berfungsi mempercepat pertukaran informasi dan penyampaian laporan situasi. Peningkatan frekuensi koordinasi juga dilakukan melalui rapat lintas instansi dan evaluasi mingguan guna memastikan setiap satuan memiliki persepsi yang sama terhadap dinamika situasi lapangan. Selain itu, pendekatan komunikasi eksternal melalui kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Pendekatan humanis ini terbukti memperkuat hubungan emosional antara aparat dan masyarakat. Dari sisi koordinasi, pembagian peran antar instansi diperjelas melalui skema kerja fungsional. Polri tetap memegang kendali dalam bidang penegakan hukum, sementara TNI memperkuat fungsi pengamanan wilayah dan pembinaan teritorial. Selain itu, pelibatan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam kegiatan deradikalisasi mulai digiatkan kembali untuk menciptakan integrasi lintas sektor yang lebih solid. Upaya-upaya tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi yang progresif dalam memperbaiki hambatan sinergitas, sesuai dengan prinsip teori sinergi yang menekankan keseimbangan hubungan antar unsur melalui komunikasi dan koordinasi yang terus disempurnakan.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, operasional, sosial, dan lintas sektor. Hambatan-hambatan tersebut pada dasarnya berakar dari perbedaan karakteristik organisasi, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas kondisi sosial di wilayah pasca-konflik. Dalam perspektif teori Sinergi Najianti (2014), hambatan tersebut mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara dua pilar utama sinergi: komunikasi efektif dan koordinasi terstruktur. Upaya peningkatan komunikasi internal dan eksternal, pembentukan posko gabungan, serta pelibatan lintas sektor menunjukkan adanya kemajuan menuju sinergi yang lebih matang dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan sinergitas TNI-Polri di Poso bukan hanya bergantung pada kemampuan teknis dalam menjalankan operasi keamanan, tetapi juga pada kesanggupan kedua institusi untuk terus memperkuat komunikasi, membangun koordinasi lintas sektor, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan dan menolak paham radikal. Sinergi yang adaptif dan berorientasi pada kolaborasi inilah yang menjadi dasar utama dalam mempertahankan stabilitas keamanan di wilayah pasca-konflik seperti Kabupaten Poso.

Strategi Penguatan Sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso

Dalam merumuskan strategi penguatan sinergitas antara TNI dan Polri dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso, penelitian ini menggunakan pendekatan teori strategi dari Arthur F. Lykke Jr. Teori ini menjelaskan bahwa strategi yang efektif harus mencakup tiga unsur utama, yaitu *Ends* (tujuan strategis), *Ways* (cara atau pendekatan untuk mencapainya), dan *Means* (sumber daya yang digunakan). Hubungan antara ketiga unsur tersebut membentuk keseimbangan yang menentukan keberhasilan strategi dalam jangka panjang. Pendekatan *Ends-Ways-Means* relevan digunakan dalam konteks Operasi Madago Raya karena operasi ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap kelompok radikal, tetapi juga

bertujuan membangun stabilitas sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mencegah munculnya kembali paham terorisme dan radikalisme di wilayah Poso dan sekitarnya. Sinergitas antara TNI dan Polri menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa seluruh elemen operasi — baik keamanan, sosial, maupun ideologis — berjalan selaras dengan tujuan nasional.

Aspek Ends (Tujuan Strategis)

Tujuan strategis dari penguatan sinergitas TNI–Polri dalam Operasi Madago Raya adalah terwujudnya kondisi keamanan yang stabil dan berkelanjutan di Kabupaten Poso, melalui kolaborasi efektif antara kedua institusi dalam mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme. Secara rinci, sasaran strategis (ends) yang hendak dicapai antara lain:

1. Menjamin keamanan dan ketertiban wilayah pasca-konflik melalui operasi terpadu yang melibatkan TNI dan Polri secara berkesinambungan.
2. Mencegah berkembangnya kembali jaringan terorisme dan radikalisme dengan mengutamakan pendekatan persuasif, pembinaan masyarakat, dan deradikalisasi berbasis komunitas.
3. Membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan serta menolak paham ekstrem melalui komunikasi sosial yang efektif.
4. Mewujudkan koordinasi lintas sektor yang kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan dalam mendukung stabilitas sosial dan ideologis.
5. Menciptakan model sinergitas TNI–Polri yang terukur dan berkelanjutan, sebagai contoh implementasi kolaborasi nasional dalam menghadapi ancaman nonmiliter di tingkat daerah.

Tujuan-tujuan strategis tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme serta arah kebijakan pertahanan nonmiliter, yang menekankan pentingnya peran aparat keamanan dalam memperkuat resiliensi ideologis masyarakat. Dengan tercapainya tujuan tersebut, Operasi Madago Raya tidak hanya menjadi sarana penegakan hukum, tetapi juga menjadi model operasi kolaboratif yang menekankan keseimbangan antara keamanan dan rekonsiliasi sosial di wilayah Poso.

Aspek Ways (Pendekatan Strategis / Cara yang Ditempuh)

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, diperlukan pendekatan dan langkah sistematis yang terarah pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas personel, serta integrasi komunikasi dan koordinasi operasional. Pendekatan strategis (ways) dalam penguatan sinergitas TNI–Polri dapat dikategorikan dalam empat dimensi utama, yaitu operasional, sosial-humanis, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor.

1. Pendekatan Operasional Terpadu. Pendekatan operasional diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Strategi ini menekankan pada pembagian peran yang jelas antara TNI dan Polri, di mana Polri menjadi leading sector dalam penegakan hukum dan intelijen, sedangkan TNI memperkuat aspek pengamanan wilayah, penggalangan, serta dukungan logistik dan mobilisasi sumber daya. Langkah strategis dalam dimensi ini antara lain:
 - a. Menetapkan SOP gabungan (Joint Operation Standard) antara TNI dan Polri dalam pelaksanaan patroli, pengamanan wilayah, dan kegiatan deradikalisasi.
 - b. Membentuk Posko Komando Terpadu (Joint Command Post) yang berfungsi sebagai pusat kendali bersama untuk koordinasi operasional dan analisis situasi keamanan secara real-time.
 - c. Melaksanakan latihan gabungan (joint training) secara berkala untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kemampuan interoperabilitas antarsatuan.

2. Pendekatan Sosial–Humanis. Pendekatan ini menitikberatkan pada strategi non-represif untuk memperkuat hubungan antara aparat dan masyarakat. Melalui kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas, TNI dan Polri menjalankan kegiatan sosial, penyuluhan keagamaan, serta pembinaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya deradikalisasi berbasis komunitas. Beberapa langkah strategisnya meliputi:
 - a. Mengembangkan program pembinaan ideologi Pancasila dan moderasi beragama di daerah rawan radikal dengan melibatkan tokoh agama dan lembaga pendidikan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi produktif untuk eks-narapidana terorisme dan keluarganya agar mereka dapat kembali berperan positif di masyarakat.
 - c. Memperkuat komunikasi sosial melalui kegiatan kemasyarakatan terpadu yang melibatkan unsur aparat, pemuda, dan tokoh lokal. Pendekatan sosial ini membangun kepercayaan publik dan mengurangi resistensi terhadap aparat keamanan, sejalan dengan prinsip *winning hearts and minds* yang menjadi landasan strategi stabilisasi pasca-konflik.
3. Pendekatan Kelembagaan dan Lintas Sektor. Sinergitas yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kerja sama internal antar instansi, tetapi juga oleh keterlibatan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, kementerian terkait, dan organisasi masyarakat. Pendekatan kelembagaan diarahkan pada penguatan kerja sama lintas sektor melalui:
 - a. Pembentukan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Daerah (FKPT-R) yang beranggotakan TNI, Polri, Pemda, BNPT, serta tokoh agama dan masyarakat.
 - b. Mendorong integrasi program deradikalisasi dan pemberdayaan ekonomi dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD).
 - c. Mengembangkan mekanisme komunikasi publik terpadu untuk menangkal hoaks, disinformasi, dan propaganda radikal melalui media sosial.
4. Pendekatan Penguatan SDM dan Kapasitas Operasional. Selain pendekatan kelembagaan, penguatan kapasitas personel juga menjadi bagian penting. Program pendidikan bersama, pertukaran penugasan, dan pelatihan lintas lembaga perlu digalakkan untuk menumbuhkan kesamaan persepsi dan budaya kerja kolaboratif. Kegiatan seperti *joint education program* dan *leadership course* antara TNI dan Polri akan membentuk pemahaman bersama terhadap konsep operasi gabungan dan meningkatkan profesionalisme di lapangan.

Aspek Means (Sarana dan Sumber Daya yang Diperlukan)

Keberhasilan strategi penguatan sinergitas sangat bergantung pada dukungan sumber daya yang memadai. Dalam konteks Operasi Madago Raya, sumber daya yang dimaksud meliputi aspek SDM, anggaran, sarana teknologi komunikasi, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kapasitas personel menjadi prioritas utama. Diperlukan personel yang memiliki kompetensi dalam pendekatan sosial, kemampuan analisis teritorial, dan kepekaan terhadap isu ideologis. Pelatihan gabungan dan pendidikan lintas institusi perlu dijadikan program berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman dan etos kerja kolaboratif.
2. Sumber Daya Anggaran dan Logistik. Pemerintah perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi kegiatan deradikalisasi, pembinaan masyarakat, dan operasi terpadu. Anggaran tidak hanya difokuskan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga untuk memperkuat kegiatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak.

3. Sarana Teknologi dan Komunikasi. Dibutuhkan sistem komunikasi terpadu dan jaringan informasi yang dapat digunakan bersama oleh TNI dan Polri, agar koordinasi di lapangan dapat berlangsung cepat dan akurat. Peningkatan infrastruktur komunikasi di wilayah pedalaman dan perbatasan Poso menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat respon operasi.
4. Dukungan Kelembagaan dan Sosial. Sinergitas yang kuat harus didukung oleh regulasi yang jelas dan payung hukum yang baku, seperti pembentukan SOP gabungan antar lembaga. Selain itu, partisipasi masyarakat dan lembaga sipil menjadi bagian dari sumber daya strategis dalam mendukung keberhasilan operasi.

Berdasarkan teori Arthur F. Lykke Jr., keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh keseimbangan antara tujuan (ends), metode (ways), dan sumber daya (means). Dalam konteks Operasi Madago Raya, integrasi ketiga unsur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : *Pertama*, Ends, Mewujudkan keamanan dan stabilitas sosial yang berkelanjutan melalui sinergitas TNI-Polri dalam mencegah radikalisme di Kabupaten Poso; *Kedua*, Ways, Melalui pendekatan operasional terpadu, pembinaan sosial-humanis, penguatan kelembagaan lintas sektor, serta peningkatan kapasitas SDM; *Ketiga*, Means, Dengan dukungan sumber daya manusia profesional, sarana komunikasi terpadu, anggaran yang memadai, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Keseimbangan antara ketiga unsur tersebut sangat penting. Tujuan yang kuat tanpa metode yang tepat atau sumber daya yang memadai akan menimbulkan ketimpangan strategi. Sebaliknya, metode yang baik tanpa dukungan sumber daya dan kejelasan arah tujuan hanya akan menghasilkan kegiatan yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi penguatan sinergitas TNI-Polri harus dirancang dengan memperhatikan keseimbangan tersebut secara dinamis.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa strategi penguatan sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya di Kabupaten Poso menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan strategis (ends), pendekatan (ways), dan sumber daya (means). Tujuan strategisnya adalah menjaga stabilitas keamanan dan mencegah penyebaran paham radikal; cara yang ditempuh meliputi integrasi operasional, pendekatan sosial-humanis, penguatan kelembagaan, dan peningkatan SDM; sedangkan sumber daya yang diperlukan mencakup dukungan anggaran, teknologi komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Strategi yang berimbang ini diharapkan dapat menjadikan Operasi Madago Raya tidak hanya sebagai operasi keamanan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan perdamaian berkelanjutan di wilayah Poso. Dengan demikian, penguatan sinergitas TNI-Polri bukan hanya sebatas koordinasi teknis, melainkan bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan ideologis dan sosial bangsa dari ancaman terorisme dan radikalisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya merupakan bentuk nyata dari kolaborasi strategis antar institusi pertahanan dan keamanan dalam menanggulangi ancaman terorisme dan radikalisme di Kabupaten Poso, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi sinergitas antara TNI dan Polri dalam Operasi Madago Raya secara umum telah berjalan baik dan efektif dalam menjaga stabilitas keamanan pasca-konflik di wilayah Poso dan sekitarnya. Sinergitas tersebut tercermin melalui berbagai bentuk kerja sama seperti pertukaran informasi intelijen, patroli gabungan, pembinaan masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan deradikalisasi berbasis kemanusiaan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kedua institusi telah mampu menempatkan diri secara proporsional

dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Polri menjadi leading sector dalam penegakan hukum dan penanganan terorisme, sedangkan TNI berperan dalam pengamanan wilayah, dukungan logistik, serta pembinaan teritorial untuk memperkuat stabilitas sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan sinergitas ini masih perlu diperkuat dalam aspek kelembagaan dan mekanisme kerja. Belum adanya SOP gabungan yang bersifat permanen, serta perbedaan sistem komando dan mekanisme birokrasi antara TNI dan Polri menjadi kendala koordinatif yang sering muncul di lapangan (lihat hal. 85 dan 119). Perbedaan pola pelaporan seperti laporan situasi (Lapsit) dan tingginya rotasi personel juga berdampak pada sinkronisasi waktu dan kesinambungan pelaksanaan operasi. Meskipun demikian, komitmen bersama yang kuat di tingkat pimpinan dan pelaksana menjadikan Operasi Madago Raya sebagai contoh nyata kolaborasi yang solid antara dua institusi pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, implementasi sinergitas TNI-Polri di Poso dapat dikatakan telah berkembang dari operasi penindakan menjadi operasi pembinaan dan pemeliharaan keamanan terpadu, yang tidak hanya menitikberatkan pada pendekatan militer dan kepolisian, tetapi juga mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan dalam menjaga ketahanan nasional.

Pelaksanaan Operasi Madago Raya juga dihadapkan pada berbagai faktor penghambat, baik yang bersumber dari internal lembaga maupun dari eksternal masyarakat dan lingkungan operasi. Secara internal, perbedaan sistem komando, budaya organisasi, serta mekanisme pelaporan antara TNI dan Polri masih menjadi kendala koordinatif yang menuntut adaptasi dan penyesuaian terus-menerus di lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan sarana transportasi juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis sulit seperti Lore Timur, Poso Pesisir, dan Napu. Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan sosial dan ideologis masyarakat menjadi tantangan yang signifikan. Masih terdapat sebagian kecil warga yang memiliki simpati terhadap paham radikal atau memiliki hubungan emosional dengan jaringan lama Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Selain itu, fenomena lapangan menunjukkan bahwa penyebaran ideologi radikal kini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan perempuan (lihat hal. 4-5). Penyebaran ini berlangsung melalui media sosial dan narasi keagamaan yang manipulatif serta menyentuh sisi emosional masyarakat. Fakta ini menunjukkan perlunya peran preemtif dan kontra-radikalisasi yang lebih kuat melalui pendidikan ideologi kebangsaan dan literasi digital. Selain itu, trauma sosial akibat konflik masa lalu membuat sebagian masyarakat masih memandang aparat keamanan dengan rasa curiga, sehingga upaya pendekatan sosial dan deradikalisasi memerlukan waktu panjang dan kesabaran. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga sipil juga menjadi hambatan tersendiri. Program pembinaan ekonomi dan sosial bagi eks-narapidana terorisme belum berjalan optimal karena minimnya anggaran dan koordinasi lintas sektor. Situasi ini menyebabkan sebagian besar kegiatan pembinaan masyarakat masih bertumpu pada inisiatif TNI-Polri di lapangan. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut bukan menjadi penghalang utama, melainkan tantangan yang terus diatasi secara adaptif melalui koordinasi, pelatihan bersama, serta kegiatan sosial terpadu antara TNI-Polri dan masyarakat lokal.

Strategi penguatan sinergitas TNI-Polri dalam Operasi Madago Raya dapat dijelaskan menggunakan pendekatan teori strategi Arthur F. Lykke Jr., yang menekankan keseimbangan antara *Ends* (tujuan), *Ways* (cara), dan *Means* (sumber daya). Tujuan strategis (*Ends*) dari penguatan sinergitas ini adalah terwujudnya kondisi keamanan yang berkelanjutan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan, serta pencegahan berkembangnya kembali jaringan radikal di wilayah Poso. Cara (*Ways*) yang ditempuh meliputi: *Pertama*, Pendekatan operasional terpadu, dengan memperkuat struktur komando gabungan dan memperjelas pembagian peran TNI dan Polri; *Kedua*, Pendekatan sosial-

humanis, melalui kegiatan pembinaan masyarakat, pendidikan ideologi kebangsaan, dan program deradikalisasi berbasis komunitas; *Ketiga*, Pendekatan kelembagaan lintas sektor, yang mendorong keterlibatan pemerintah daerah, BNPT, dan tokoh agama dalam upaya stabilisasi sosial; serta *Keempat*, Pendekatan peningkatan kapasitas SDM dan teknologi komunikasi, guna mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan efektivitas operasi, dan memperkuat kerja sama lapangan. Sementara itu Sarana pendukung (*Means*) mencakup penguatan anggaran operasional, peningkatan jumlah dan kualitas personel, penyediaan sarana komunikasi terpadu, serta dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah. Keseimbangan ketiga elemen strategi ini penting untuk memastikan bahwa operasi dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi penguatan sinergitas TNI–Polri dalam Operasi Madago Raya tidak hanya diarahkan untuk peningkatan efektivitas operasional, tetapi juga sebagai instrumen pertahanan nonmiliter nasional yang menitikberatkan pada stabilitas sosial, penguatan ideologi kebangsaan, serta pembangunan kepercayaan antara aparat dan masyarakat di wilayah pasca-konflik seperti Poso. Pendekatan ini diharapkan menjadi model nasional dalam pelaksanaan operasi terpadu antara TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman terorisme dan radikalisme di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Sinergitas TNI–Polri dalam Operasi Madago Raya guna mencegah penyebaran paham terorisme dan radikalisme di Kabupaten Poso, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Panglima TNI: Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) gabungan TNI–Polri dalam pelaksanaan operasi keamanan terpadu pasca-konflik seperti Operasi Madago Raya. SOP ini penting untuk mengatur pembagian tugas, pola komando, dan mekanisme pelaporan agar koordinasi lintas institusi berjalan efektif serta menghindari tumpang tindih kewenangan di lapangan. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penanggulangan terorisme melalui pelatihan terpadu (joint training) bersama Polri. Pelatihan ini diharapkan menyamakan pola pikir operasional dan memperkuat kemampuan komunikasi, empati sosial, serta kedisiplinan dalam menghadapi masyarakat pasca-konflik. Mengembangkan sistem komunikasi dan pusat data terpadu (Joint Command and Information Center) antara TNI dan Polri, yang mampu mengintegrasikan laporan intelijen, patroli, dan kegiatan deradikalisasi, sehingga proses pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan efisien.
2. Kepada Kapolri: Memperkuat peran Polri sebagai leading sector dalam penegakan hukum dan upaya deradikalisasi melalui optimalisasi koordinasi dengan TNI dan pemerintah daerah. Kapolri diharapkan mengeluarkan kebijakan turunan yang menegaskan struktur tanggung jawab dan tata hubungan komando dalam Operasi Madago Raya. Menetapkan pola rotasi personel Polri yang lebih adaptif di wilayah operasi Poso, agar kesinambungan pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan TNI tidak terganggu oleh pergantian personel yang terlalu cepat. Mendorong peningkatan kemampuan personel Polri di bidang komunikasi sosial, literasi digital, dan penanganan kelompok rentan, sebagai bagian dari strategi kontra-radikalisasi berbasis masyarakat yang lebih humanis dan edukatif.
3. Kepada Gubernur Sulawesi Tengah: Meningkatkan dukungan politik, kebijakan, dan anggaran daerah terhadap pelaksanaan program deradikalisasi dan pembinaan masyarakat eks-narapidana terorisme. Pemerintah provinsi perlu mengintegrasikan program deradikalisasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan dan sosial. Membentuk forum koordinasi provinsi penanggulangan radikalisme yang melibatkan Forkopimda, BNPT, TNI–Polri, dan tokoh

agama, yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, sinkronisasi kebijakan, dan pemantauan terhadap potensi penyebaran paham radikal di wilayah Sulawesi Tengah. Menginisiasi program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di daerah rawan radikalisme, dengan fokus pada pengembangan UMKM, pendidikan kebangsaan, dan peningkatan literasi ideologi Pancasila di kalangan generasi muda.

4. Kepada Bupati Poso: Memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan aparat keamanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat, penyuluhan sosial, dan deradikalisasi berbasis komunitas lokal. Pemerintah kabupaten perlu menempatkan program ini sebagai prioritas utama dalam upaya stabilisasi pasca-konflik. Mendorong pelibatan aktif tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dalam forum komunikasi masyarakat damai, sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran ideologi intoleran di tingkat desa dan kecamatan. Meningkatkan sinergi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Tenaga Kerja, untuk menyediakan pelatihan kerja, beasiswa pendidikan, dan bantuan usaha bagi keluarga eks-narapidana terorisme agar mereka dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara produktif.
5. Kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam): Memperkuat koordinasi dan supervisi antar instansi dalam pelaksanaan program deradikalisasi nasional agar tidak berjalan sektoral. BNPT diharapkan menjadi penghubung strategis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi kebangsaan di wilayah pasca-konflik seperti Poso. Mendorong pembentukan mekanisme evaluasi terpadu terhadap keberhasilan program deradikalisasi, termasuk pemantauan terhadap eks-narapidana terorisme, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program yang dilaksanakan oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah.
6. Kepada Tokoh Agama, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi Masyarakat: Meningkatkan peran tokoh agama dan ulama lokal sebagai agen moderasi beragama dengan terus mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kebangsaan, dan toleransi dalam dakwah serta kegiatan sosial keagamaan. Lembaga pendidikan dan pesantren diharapkan menjadi pusat penyebaran paham Islam moderat dengan memperkuat kurikulum kebangsaan dan memperluas kegiatan pembinaan keagamaan yang berwawasan Pancasila. Organisasi masyarakat dan pemuda perlu didorong untuk berperan sebagai mitra sosial aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah melalui kegiatan edukatif, sosial, dan ekonomi yang menguatkan ketahanan ideologis masyarakat.
7. Kepada Komando Kewilayahan (Kodam XIII/Merdeka dan Polda Sulawesi Tengah): Meningkatkan sinergi operasional antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat di tingkat desa. Kolaborasi ini perlu difokuskan pada kegiatan komunikasi sosial, deradikalisasi berbasis komunitas, serta deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham radikal. Mengoptimalkan kegiatan nonmiliter dan sosial-humanis dalam operasi Madago Raya, seperti bakti sosial, kegiatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.
8. Kepada Peneliti Selanjutnya: Penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas sinergitas TNI-Polri dari perspektif kuantitatif, dengan mengukur tingkat keberhasilan koordinasi dan dampak sosial terhadap penurunan potensi radikalisme di wilayah operasi. Peneliti berikutnya diharapkan mengembangkan model konseptual sinergitas pertahanan-keamanan terpadu, yang dapat diaplikasikan pada operasi nonmiliter di wilayah lain dengan potensi konflik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Bambang. (2005). *Teror Bom di Indonesia*. Jakarta: Grafindo.
- Ali, H. (2020). *Strategi Deradikalisasi: Membongkar Jaringan, Menyusun Solusi*. Jakarta: Pustaka Islamika.
- Andi Febri Herawati & Ilyas. (2024). Communication Strategy of the National Police Organization in the Implementation of the "Madago Raya Police" Program in Handling Radicalism in Poso Regency. *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 23, No. 1, Maret 2024.
- Andi Febri Herawati N., dkk. (2023). Strategi Komunikasi Satgas Preventif Ops Madago Raya dalam Pemulihan Kamtibmas di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 10, Oktober 2023.
- BNPT. (2023). *Laporan Tahunan Program Deradikalisasi Nasional*. Jakarta: BNPT RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, dkk. (2013). *Perkembangan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: BNPT Republik Indonesia.
- Harahap, R. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Radikalisme melalui Sinergi TNI-Polri di Wilayah Sulawesi Tengah. *Jurnal Kebijakan Pertahanan Negara*, Vol. 9, No. 2.
- Herlib, D., & Natsir, N. (2026). Evaluation of Counterterrorism Policy in Poso District, Central Sulawesi Province. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1.
- Idris, I. (2018). *Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi, dan Program Penanggulangan Terorisme*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Ikhsan, A. (2023). *Pendidikan Perdamaian: Confidence Building Measure Dampak Konflik Poso*. Jakarta: CV Jejak
- Juwana, H. (2014). Anti-Terrorism Efforts in Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 11, No. 2.
- Kementerian Pertahanan RI. (2023). *Strategi Bela Negara dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter*. Jakarta: Pusdatin Kemhan.
- Kristanto, K., Fajrina, R. M., & Wahid, A. (2024). *Sinergitas TNI-Polri dalam Penanganan Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Kurniawan, A., & Priambodo, D. (2023). *Sinergi TNI-Polri dalam Operasi Keamanan Terpadu: Studi Kasus Poso*. Bandung: Forum Kajian Keamanan Nasional.
- Mabes Polri. (2025). *Dokumen Evaluasi Renops Madago Raya Tahap I Tahun 2025*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Mersan, A. (2023). *Pendidikan Perdamaian: Confidence Building Measure Damai Kapalé Poso*. Jakarta: CV Jejak.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.
- Nugroho, A., & Fauzan, R. (2022). Pendekatan Humanis dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 1.
- Nurdin, M. (2023). *Poso Pasca-Conflict: Dinamika Terorisme dan Upaya Deradikalisasi*. Palu: Pustaka Sulteng.
- Peraturan Kepala BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- Praditya, Y. (2016). Optimalisasi Sinergitas TNI-Polri-Sipil dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 6, No. 3.



- Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI–Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 2, No. 1, Universitas Bhayangkara.
- Prasetyo, T. (2023). *Deradikalisasi di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan Implementasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Renops Madago Raya 2025 – Tahap I & II. Dokumen Operasi Madago Raya. Mabes Polri – Polda Sulteng.
- Rezky Merdiansyah, Supriadi, & Djatmiko. (2024). Penerapan Community Crime Prevention pada Operasi Satgas Intelijen Perbantuan Madago Raya BNPT di Poso. *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 9, No. 1, Mei 2024.
- Roma Tressa. (2021). Kebijakan Penanganan Terorisme di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, Universitas Sintuwu Maroso, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Ryacudu, R. (2020). *Pertahanan Nirmiliter: Strategi Menghadapi Ancaman Non-Tradisional*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI.
- Sirua, A. A. D., & Priyambodo, M. A. (2022). Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Terorisme di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Poso). *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, D. (2022). *Kontra-Radikalisasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sutrisno, A., & Fitriani, E. (2021). *Radikalisme dan Ancaman Kebangsaan: Perspektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Gama Press.
- Syafiq, M. (2019). Deradicalisation and Disengagement from Terrorism and Threat to Identity: An Analysis of Former Jihadist Prisoners' Accounts. *Psychology and Developing Societies*, 31(2), 227–251.
- Thalib, M. (2015). *Islam Radikal dan Upaya Deradikalisasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wibisono, A. (2021). *Islam, Radikalisme dan Reintegrasi Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, P. (2023). Integrasi Strategi Deradikalisasi melalui Sinergi TNI–Polri dan BNPT. Artikel Kebijakan Pertahanan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas).
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Yunus, A. F. (2017). Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya terhadap Islam. *Studi Al-Qur'an*, 13(1).
- Zuhri, S. (2018). Implementation of the Terrorism Deradicalization Program by the National Counter-Terrorism Agency (BNPT): A Political Spectrum Perspective. *Saheeh*, 3(2), 109–122.